

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Jika kita berbicara tentang keterbelakangan bangsa Indonesia, maka alamat utamanya adalah Desa-Desa beserta masyarakatnya. Hal tersebut dapat dimaklumi karena sebagian besar warga masyarakat Indonesia berdomisili di wilayah pedesaan (Rahardjo, 2004). Pelaksanaan pembangunan masalah menempatkan Pemerintah seolah-olah sebagai agen tunggal pembangunan, sedang masyarakat Desa dianggap tidak memiliki kemampuan dan masih tertinggal (Wastutiningsih, 2004). Sejak jaman kolonial, orde lama, dan orde baru masyarakat Desa hanya diposisikan sebagai objek bukan sebagai subjek pembangunan. Di era reformasi, menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan merupakan hal yang penting. Apalagi sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah pedesaan dengan jumlah penduduknya yang besar. Oleh karena itu menggali potensi desa dan sumber-sumber produksi yang selama ini ditelantarkan penting untuk diberdayakan.

Ditinjau dari konteks pembangunan bahwa pembangunan perdesaan pada prinsipnya sama dengan prinsip pembangunan lainnya, setidaknya ada tiga isu utama yang harus diperhatikan untuk memahami dan meletakkan posisi desa (Sutoro Eko, 2004). Pertama, Desa secara empiris terbentang dalam konteks relasi sosial-budaya dan ekonomi-politik baik

internal maupun eksternal. Kedua, secara umum desa mempunyai domain Pemerintahan (*governance*) dan pembangunan. Pemerintahan terkait dengan relasi kekuasaan antar aktor dan antar institusi, sedangkan pembangunan adalah wilayah yang berurusan dengan pengolahan sumber daya ekonomi desa. Ketiga, berbicara mengenai pengembangan Desa (baik Pemerintah maupun pembangunan) secara perspektif, Desa harus diletakkan dalam bingkai desentralisasi dan demokrasi.

Desentralisasi adalah bingkai preskriptif relasi eksternal antar Desa dengan super desa (Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dan pusat) serta pasar. Desentralisasi telah mengajarkan bahwa kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya harus dibagi sampai level ke bawah, yakni sampai ke tingkat desa.

Dalam proses perencanaan pembangunan Desa harus dilihat dan dipahami bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan suatu panduan atau model penggalan potensi dan gagasan pembangunan Desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan (Supeno,2011).

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan

kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat dan mengorganisir masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Desa partisipasi masyarakat mempunyai peran penting karena pembangunan Desa sebenarnya ditujukan untuk memajukan Desa itu sendiri dan memanfaatkan berbagai potensi dan sumberdaya yang ada, maka dengan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Di dalam dunia kepariwisataan sekarang terdapat kecenderungan untuk mengolah potensi Daerah, terutama Desa beserta strategi pemberdayaan masyarakatnya. Seperti dinyatakan Fandeli, bahwa kebijakan pengembangan pariwisata daerah harus didasarkan pada paradigma yang berkembang di Daerah (Fandeli, 2002). Maka logis jika ada semacam kehendak untuk menempatkan Desa yang berpotensi dan memiliki sumber-sumber produksi sebagai landasan strategisnya, sekaligus memberdayakan masyarakatnya.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan upaya untuk mengembangkan pembangunan Desa, Pemerintah Kabupaten Bandung telah melaksanakan program Desa wisata. Ada 10 Desa yang dijadikan sebagai Desa wisata di Kabupaten Bandung karena memiliki kekhasan baik seni budaya, kerajinan, kuliner, maupun produk pertaniannya.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki sejumlah Desa di Kabupaten Bandung dinilai layak di kembangkan menjadi Desa wisata. Desa-Desa itu memiliki keunggulan dalam kerajinan tangan, perkebunan, pertanian, seni lukis, kampung seni, serta makanan olahan.

Salah satu Desa yang menjalankan program Desa wisata tersebut adalah Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Kelurahan Jelekong yang terkenal dengan seni lukis, wayang golek, kuliner tradisional, kerajinan tangan dan seni budayanya diresmikan menjadi Desa wisata oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada November 2011 SK 556.42/kep71-Dispapar 2011.

Pengembangan Desa wisata juga ditujukan untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang kini masih membelit sejumlah warga di desa-desa tersebut. di Kelurahan Jelekong, dari total jumlah penduduk 6.577 kepala keluarga, 2.768 kepala keluarga diantaranya masih mengalami kemiskinan.

Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang tidak memiliki kredibilitas, kreatif, dan etos kerja yang kurang memphuni dan tingkat pendidikan yang rendah. Oleh sebab itu dengan adanya program Desa wisata diharapkan mampu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, karena tujuan utama program Desa wisata adalah untuk menggali potensi di suatu daerah seperti potensi alam, seni budaya, makanan tradisional, dan pertanian. Dengan memberdayakan masyarakat sekitarnya yang tidak memiliki pekerjaan untuk mengelola Desa wisata di

suatu Daerah akan memberikan pemasukan finansial untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan dasar dan mencapai kesejahteraan sosial ekonomi masyarakatnya. Dalam menjalankan program Desa Wisata di Kelurahan Jelekong peran masyarakat menjadi sangat penting, karena masyarakatlah yang menjadi subjek dalam menjalankan program Desa wisata di Kelurahan Jelekong.

Dari uraian di atas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata di Kelurahan Jelekong?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat Kelurahan Jelekong?
3. Bagaimana kontribusi pemberdayaan masyarakat melalui program Desa wisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Jelekong?
4. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Jelekong?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **A. Maksud penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran atau penjelasan tentang implementasi program Pemerintah Kabupaten Bandung tentang program Desa wisata khususnya, pelaksanaan program Desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Jelegong.

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Desa wisata di Kelurahan Jelegong.
2. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat Kelurahan Jelegong.
3. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pemberdayaan masyarakat melalui program Desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Jelegong.
4. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Jelegong.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **A. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan membawa manfaat untuk ilmu pengetahuan

pada umumnya dan ilmu kesejahteraan sosial pada khususnya. Juga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

#### B. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini secara umum diharapkan menjadi pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program Desa wisata sebagai salahsatu potensi di suatu Desa untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya bagi Pemerintah dapat mengatasi masalah ekonomi dan pengangguran. .

Serta diharapkan Pemerintah bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Desa Desa yang masih terpencil, sebagai contoh Kelurahan Jelekong yang telah menjalankan program Desa wisata karena masyarakatnya yang memiliki keterampilan dalam bidang kesenian seperti melukis, pengrajin wayang golek dan kesenian lainnya sehingga dengan begitu Desa-Desa yang memiliki potensi bisa menjadi destinasi wisata dan mampu memberdayakan masyarakatnya yang tidak memliki pekerjaan.